

**2012 - 2017**

# Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen Perencanaan Pembangunan

Pedoman Perencanaan Kerja SKPD

Tolak Ukur Keberhasilan SKPD

*Pasar Tradisional Pangkajenean*

- + Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Terpadu
- + Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- + Jl. Pulau Belitung No. 2, Kelurahan Air Itam
  - Telp. (0717) 439333 - 439336
  - Fax. (0717) 439335
- + PANGKALPINANG

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Tahun 2012-2017 hasil *review* setelah terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016. Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra merupakan rencana pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun sekaligus merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 berisi visi-misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan beserta pendanaan indikatif Bappeda Tahun 2012-2017. Renstra ini juga memuat indikator dan target kinerja sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Renstra ini sebagai pedoman operasional bagi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta berbagai pihak lain yang sebagai bahan dalam harmonisasi jalinan tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Pangkalpinang,

2017

**Plt. KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**Dr. Ir. BUDIMAN GINTING, Dipl, BE,MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19581010 198303 1 018**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG .....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda .....	II-1
2.2. Sumber Daya Manusia Bappeda dan Asset SKPD .....	II-16
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda .....	II-19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda .....	II-48
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	III-1
3.1.1. Masalah yang bersifat internal .....	III-1
3.1.2. Masalah yang bersifat eksternal .....	III-2
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD Tahun 2012-2017 .....	III-4
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota ..	III-6
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	III-7
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-7
BAB IV ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	IV-1
4.1. Visi dan Misi .....	IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	IV-3
4.3. Strategi dan Kebijakan .....	IV-6

	Halaman
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	V-1
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	VI-1
BAB VII PENUTUP .....	VII-1

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan atas berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa mendatang. Dengan demikian terdapat 4 (empat) elemen dasar perencanaan, yaitu (1) merencanakan berarti memilih, (2) perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya, (3) perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan (4) perencanaan untuk masa depan. Perencanaan memiliki arti yang penting bagi suatu pemerintahan seiring dengan kewenangan yang dimiliki untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat provinsi, ketiga bentuk perencanaan menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka

bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzner, 2001). Sebagai perencanaan yang berorientasi ke depan dalam upaya untuk membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan maka penyusunan rencana strategis perlu didasarkan pada partisipasi masyarakat; data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017 melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang RPJMD. Setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis PD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat 1 mengamanatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 12 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra PD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

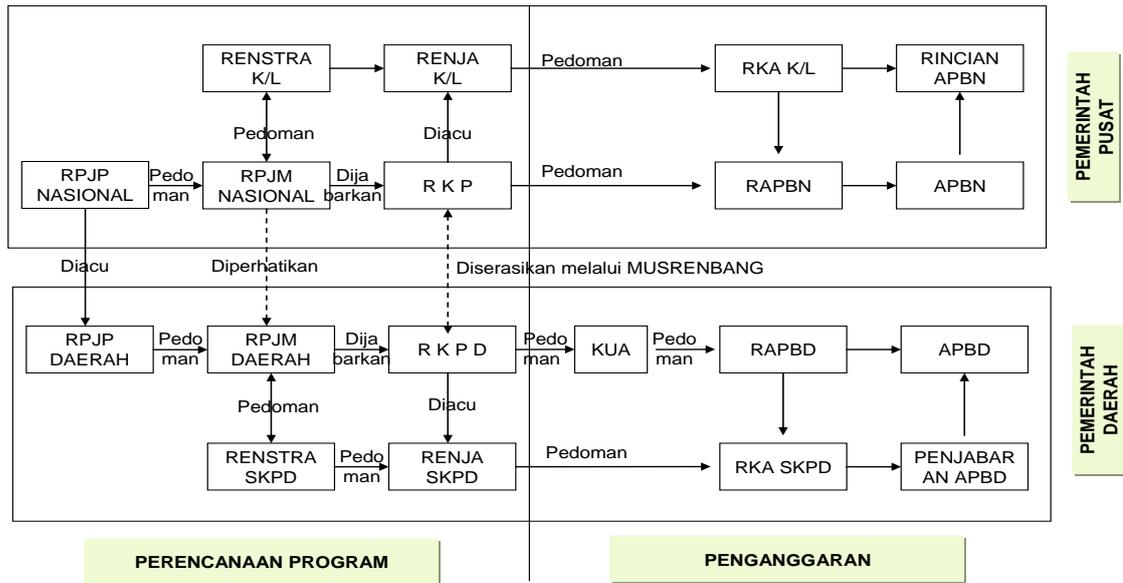
Mengacu pada uraian tersebut di atas dan mengingat adanya perubahan struktur organisasi dan tata laksana satuan kerja perangkat daerah yang diatur dengan Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017. Penyesuaian ini diharapkan dapat menjamin tingkat keselarasan dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2012-2017; dan pertanggungjawaban kinerja (akuntabilitas) kepada publik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Hubungan antar dokumen perencanaan lainnya dengan Renstra mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

### **Gambar I.1**

#### **Hubungan Dokumen Renstra PD dengan Dokumen Lainnya**



## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dimaksudkan untuk: menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Bappeda tahun 2012-2017; dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017.
- b. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Bappeda; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Bappeda dengan PD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 terdiri dari 7 (tujuh) bab dan disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan; berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- Bab 2 Gambaran Pelayanan Bappeda; memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda, sumber daya Bappeda, kinerja pelayanan Bappeda, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda

- Bab 3 Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi; berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan penentuan isu-isu strategis;
- Bab 4 Visi Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan kebijakan, berisi visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah bappeda, strategi dan kebijakan bappeda
- Bab 5 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif,
- Bab 6 Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD,
- Bab 7 Penutup

## **B A B II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA**

#### **PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

---

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda**

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D), Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;

- b. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. penyelenggaraan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.1 Kepala Bappeda**

Tugas : memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

- 1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- 2) penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- 3) penyelenggaraan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- 4) penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- 5) penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTB;

- 6) penyelenggaraan pembinaan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- 7) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- 8) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **2.1.2 Sekretariat**

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah meliputi perencanaan, umum, keuangan serta membantu Kepala Dinas Pendidikan mengoordinasikan bidang-bidang.

Fungsi :

- 1) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- 2) penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum serta keuangan;
- 3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- 4) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- 5) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **2.1.3 Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah**

Tugas: memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah.

Fungsi:

- 1) penyelenggaraan verifikasi perencanaan program kerja Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah;
- 2) penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, informasi pembangunan daerah dan pelaporan;
- 3) penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan analisis pendanaan pembangunan daerah;
- 4) penyelenggaraan verifikasi kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- 5) penyelenggaraan koordinasi pembinaan umum serta koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- 6) penyelenggaraan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- 7) penyelenggaraan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
- 8) penyelenggaraan koordinasi fasilitasi partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengevaluasian pembangunan daerah;
- 9) penyelenggaraan koordinasi pengelolaan sistem informasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- 10) penyelenggaraan koordinasi penyusunan pelaporan pemerintah daerah daerah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN;
- 11) penyelenggaraan verifikasi hasil pengendalian, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah;
- 12) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- 13) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.4 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Fungsi:

- 1) penyelenggaraan perencanaan program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 2) penyelenggaraan koordinasi pengkajian dan perumusan kebijakan prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan Perencanaan secara holistik-tematik, integrative dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;
- 3) penyelenggaraan koordinasi penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;
- 4) penyelenggaraan penyiapan bahan untuk pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;

- 5) penyelenggaraan penyiapan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;
- 6) penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertical (antara pusat dan daerah) maupun secara horizontal (antar perangkat daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;
- 7) penyelenggaraan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta penunjang urusan perencanaan;
- 8) penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;

- 9) penyelenggaraan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;
- 10) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antardaerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;
- 11) penyelenggaraan verifikasi hasil pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 12) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- 13) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **2.1.5 Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Tugas : tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Fungsi:

- 1) penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 2) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis prioritas pada urusan perdagangan,

perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan secara holistic-tematik, integrative dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;

- 3) penyelenggaraan koordinasi penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada urusan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
- 4) penyelenggaraan koordinasi penyiapan bahan untuk pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
- 5) penyelenggaraan koordinasi penyiapan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
- 6) penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan

- kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada urusan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
- 7) penyelenggaraan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan pada urusan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
  - 8) penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
  - 9) penyelenggaraan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
  - 10) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antardaerah pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral,

pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;

- 11) penyelenggaraan verifikasi hasil pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
- 12) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- 13) penyelenggaraan fungsi lain yang oleh atasan.

### **2.1.6 Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan**

Tugas: memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan analisis dan perumusan kebijakan prioritas, strategi dan arah kebijakan, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan.

Fungsi:

- 1) penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- 2) penyelenggaraan koordinasi analisis dan perumusan kebijakan prioritas pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah,

- penelitian dan pengembangan secara holistic-tematik, integrative dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;
- 3) penyelenggaraan koordinasi penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan;
  - 4) penyelenggaraan koordinasi penyiapan bahan untuk pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan;
  - 5) penyelenggaraan koordinasi penyiapan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan;

- 6) penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan;
- 7) penyelenggaraan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan;
- 8) penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan;

- 9) penyelenggaraan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan;
- 10) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antardaerah pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan;
- 11) penyelenggaraan verifikasi hasil pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
- 12) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- 13) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **2.1.7 Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Tugas: memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Fungsi:

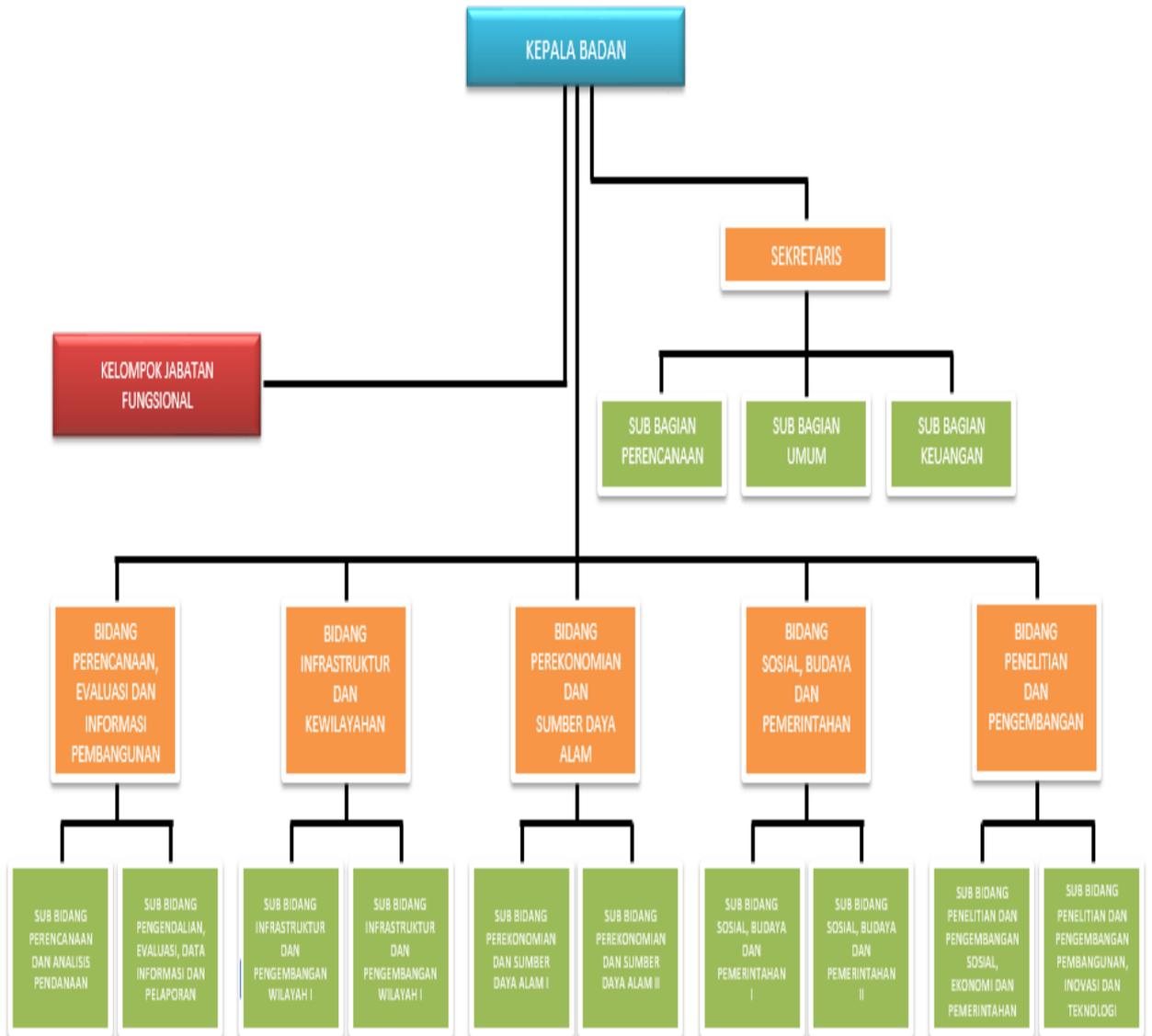
- 1) penyelenggaraan perencanaan program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) penyelenggaraan koordinasi penyusunan rumusan kebijakan teknis

- penelitian dan pengembangan pemerintahan Provinsi;
- 3) penyelenggaraan penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Provinsi;
  - 4) penyelenggaraan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Provinsi;
  - 5) penyelenggaraan pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Provinsi;
  - 6) penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
  - 7) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Provinsi;
  - 8) penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Provinsi;
  - 9) penyelenggaraan pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Provinsi; dan
  - 10) penyelenggaraan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
  - 11) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **2.1.8 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada gambar II.1.

**Gambar II.1**  
**Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



*Sumber : Subbag Umum Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017*

## 2.2. Sumber Daya Manusia Bappeda dan Asset PD

Kondisi data kepegawaian sampai dengan bulan Agustus 2015 adalah jumlah pegawai sebanyak 75 orang, terdiri dari 4 orang atau 5,3 % berpendidikan doktor/S3; 19 orang atau 25,3 % berpendidikan master/S2; 42 orang atau 56 % berpendidikan sarjana/S1; 3 orang atau 4 % Sarjana muda/D3, 7 orang atau 9,3 % berpendidikan SLTA. Postur dan rincian data pegawai dapat dilihat pada Tabel II.1 dan Gambar II.2

Tabel II.1

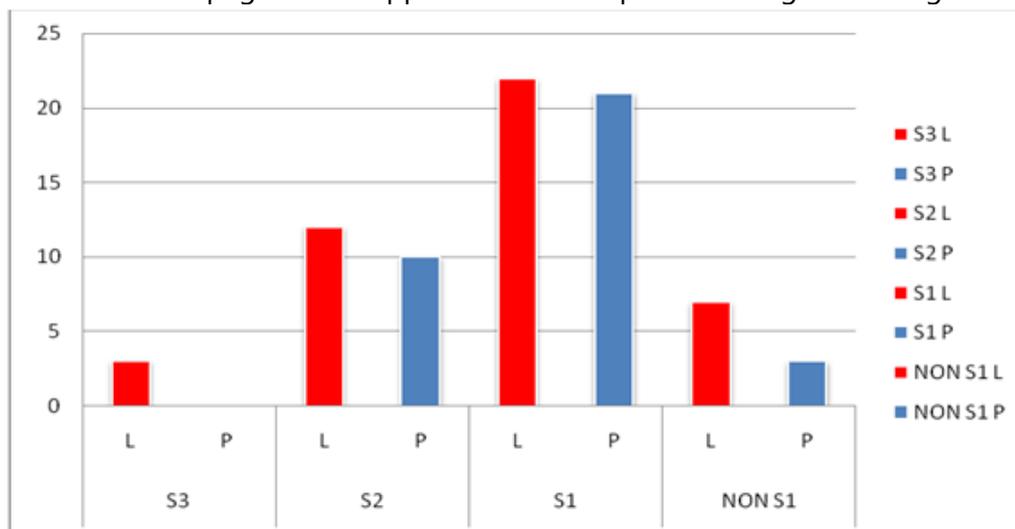
Komposisi Pegawai Bappeda Tahun 2017 Berdasarkan Pendidikan

KELOMPOK JABATAN	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH	
		S3		S2		S1		NON S1			
		L	P	L	P	L	P	L	P		
JPT	PRATAMA (Eselon II)			1						1	
ADMINISTRASI	ADMINISTRATOR (Eselon III)	3		3						6	
	PENGAWAS (Eselon IV)	1		3	2	4	3			13	
	PELAKSANA										
	1	Analisis Lingkungan Hidup					1				1
	2	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			1	3	5	3		1	13
	3	Analisis Program Pembangunan				1					1
	4	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur					1				1
	5	Analisis Tata Ruang					1				1
	6	Analisis Tata Usaha					1				1
	7	Bendahara						1			1
	8	Penata Laporan Keuangan						1			1
	9	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor							1		1
	10	Pengadministrasi Perencanaan dan Program							1		1
	11	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana							1		1
	12	Pengadministrasi Umum								1	1
13	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah							1		1	
14	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan					1				1	
15	Pranata Laporan Keuangan (Petugas SAI)								1	1	

KELOMPOK JABATAN	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH			
		S3		S2		S1		NON S1					
		L	P	L	P	L	P	L	P				
	16	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana								1			1
FUNGSIONAL	1	Perencana Muda				1		1					2
	2	Perencana Pertama			1	1	2	4					8
	3	Pranata Komputer Muda			1								1
	4	Pranata Komputer Pertama					2						2
	5	Statistisi Pelaksana Lanjutan					1						1
	6	Statistisi Pertama			1								1
	7	Penerjemah Pertama					1	1					2
	8	Peneliti Pertama					1	3					4
	9	Pranata Humas					1						1
	10	Arsiparis Terampil Pelaksana							1				1
	11	Calon Perencana					1						1
	12	Calon Analis Kebijakan					2						2
	13	Calon Pranata Komputer					1				1		2
		<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>4</b>		<b>75</b>	

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017

Gambar II.2  
Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Memperhatikan kondisi pegawai seperti tersebut di atas, berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki secara umum kekuatan aparatur Bappeda cukup memadai.

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, sampai saat ini kebutuhan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas rutin cukup terpenuhi, misalnya saja setiap pegawai memiliki komputer sebagai alat bantu kerja yang utama. Kebutuhan akan listrik, telepon, faximili dan internet telah terpenuhi. Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah juga telah memiliki server yang memuat database website Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk juga beberapa aplikasi yang sudah dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Beberapa aplikasi tersebut antara lain, *e-planning*, SI KarEn, Ina Geo Portal, dsb. Tabel II.2 berikut menampilkan asset Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.2

Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

(No	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
	A		<b>ASET TETAP</b>		<b>Rp. 19.610.154.112</b>
1	01	01	TANAH	0	Rp 35.247.769
2	02		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>1434</b>	<b>Rp. 6.159.563.423</b>
		02	Alat-alat Besar	0	0
		03	Alat-alat Angkutan	18	Rp. 1.837.335.000
		04	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Rp. 16.600.000
		05	Alat-alat Pertanian/Peternakan	0	
		06	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1321	Rp. 3.901.708.423

(No	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	
1	2	3	4	5	6	
3	03	07	Alat-alat Studio dan Komunikasi	94	Rp. 392.920.000	
		08	Alat-alat Kedokteran	0		
		09	Alat-alat Laboratorium	0		
		10	Alat-alat Keamanan	0		
		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>			<b>13</b>	<b>Rp. 5.946.011.600</b>
		11	Bangunan Gedung	9	Rp. 5.946.011.600	
4	04	12	Bangunan Monumen	4	0	
		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>			<b>11</b>	<b>Rp. 4.156.589.900</b>
		13	Jalan dan Jembatan	2	Rp. 33.330.000	
5	05	14	Bangunan Air / Irigasi	0	0	
		15	Instalasi	0	0	
		16	Jaringan	9	Rp. 4.123.259.900	
		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>			<b>25</b>	<b>Rp. 3.312.741.420</b>
		17	Buku Perpustakaan	21	Rp. 3.299.881.420	
		18	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	4	Rp. 12.860.000	
6	06	19	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0	0	
		Lain-lain	0	0		
		<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>			<b>0</b>	
7	B	<b>ASET LAINNYA</b>			<b>Rp. 1.079.121.340</b>	
7	01	Aset Tak Berwujud	0	-		
	02	Aset Lain-lain	0	Rp. 1.079.121.340		

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017

### 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda

Untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012–2017, tantangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan urusan wajib Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang, dan Statistik kemudian dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Bappeda dibentuk untuk melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut perlu menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah

yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada dasarnya kegiatan Bappeda adalah "*mengarahkan, menetapkan rumusan kebijakan, mengendalikan, mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan*" baik di tingkat provinsi maupun antar kabupaten/kota. Setiap program pembangunan dan sistem memberikan kemudahan bagi PD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat keberhasilannya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengubah paradigma perencanaan yang adasehinggaseluruh komponen terlibat dalam penyusunan perencanaan dengan memadukan berbagai pendekatan dalam proses perencanaan yang telah ditentukan (politik, teknokratik, partisipatif dan *bottom-up* dan *top down*), yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat yang selama ini hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Diharapkan fungsi dan peran musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari desa hingga nasional dapat mewujudkan sistem perencanaan yang terintegrasi.

Guna dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat untuk menyampaikan usulan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam

Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada lima tahun terakhir, secara umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menerus mengalami perbaikan di berbagai aspek. Beberapa indikator dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terkait dengan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Indikator dalam mendukung RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012.
2. Indikator dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012.
3. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
5. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, Perguruan Tinggi, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan dunia usaha;
6. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran;
7. Meningkatnya produk-produk pengembangan dan penelitian, yang akan digunakan sebagai pertimbangan penyusunan perencanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Belum cukupnya variabel dan parameter yang jelas untuk menganalisis hasil evaluasi program dan kegiatan pembangunan.
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, salah satu contohnya adalah penyusunan prioritas usulan pembangunan;
7. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
8. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
9. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
10. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran;
11. Belum tersedianya data-data indikator keberhasilan pembangunan yang disajikan secara terpadu dan komprehensif.

Berikut target dan realisasi indikator pembangunan tahun 2007-2010 (Tabel II.3) dan realisasi anggaran anggaran Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011 (Tabel II.4).

Tabel II.3  
Target dan Realisasi Indikator Pembangunan  
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2010

NO	INDIKATOR	Tahun							
		2007		2008		2009		2010	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LPE Tanpa Migas (%)	5.37	5.37	4.29	5.03	4.20	3.77	4.39	5.80
2	Tingkat Inflasi (%)	2.62	7.75	2.95	15.07	3.29	1.44	3.67	9.36
3	Nilai Ekspor (%) Pertumbuhan	6	-	6.14	-	6.85	-	7.64	37.45
4	Investasi (%)	3.21		3.22		3.32		3.42	7.20
5	PDRB menurut harga berlaku dgn migas (Rp Juta)	17,895,017	17,895,017	20,042,419	21,523,451	22,367,340	22,982,017	25,006,686	25,705,625
	PDRB menurut harga berlaku tanpa migas (Rp Juta)	17.69.399	17,369,399	19,675,009	20,846,415	21,804,396	22,418,816	24,204,929	25,083,739
	PDRB	9,465,062	9,464,539	9,900,455	9,899,925	10,345,975	10,266,450	10,832,236	10,866,810

NO	INDIKATOR	Tahun								
		2007		2008		2009		2010		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	menurut harga konstan dgn migas (Rp Juta)									
	PDRB menurut harga konstan tanpa migas (Rp Juta)	9,257,539	9,257,016	9,654,854	9,713,204	10,060,213	10,096,574	10,501,364	10,689,062	
6	Pendapatan perkapita (Rp) menurut harga berlaku dgn migas	14,473,679	14,473,679	16,012,645	17,281,399	17,870,112	17,756,997	19,978,785	18,786,903	
	Pendapatan perkapita (Rp) menurut harga berlaku tanpa migas	13,998,719	13,998,719	15,719,107	16,797,229	17,420,355	17,262,148	19,338,231	18,263,353	
	Pendapatan perkapita (Rp) menurut	7,583,722	7,583,249	7,909,847	7,805,023	8,265,790	7,953,089	8,654,282	8,414,368	

NO	INDIKATOR	Tahun								
		2007		2008		2009		2010		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	harga konstan dgn migas									
	Pendapatan perkapita (Rp) menurut harga konstan tanpa migas	7,396,199	7,395,726	7,713,627	7,638,683	8,037,484	7,803,829	8,389,936	8,256,451	
7	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	18.67	18,67	18.93	19.00	19.20		19.47	22.00	
8	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB (%)	20.40	20.40	18.88	19.24	19.98	18.28	15.20	14.00	
9	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	22.51	22.51	22.74	22.44	22.98	21.48	23.21	22.00	

NO	INDIKATOR	Tahun								
		2007		2008		2009		2010		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	terhadap PDRB (%)									
10	Kontribusi Sektor listrik, Gas dan Air Bersih terhadap PDRB (%)	0.65	0.65	0.63	0.58	0.61	0.61	0.59	1.00	
11	Kontribusi Sektor Bangunan terhadap PDRB (%)	5.87	5.87	6.37	6.51	6.91	6.92	7.40	7.00	
12	Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran terhadap PDRB (%)	17.35	17.55	17.60	18.12	17.86	18.28	18.12	19.00	
13	Kontribusi Sektor	3.36	3.36	3.47	3.34	3.59	3.30	3.30	4.00	

NO	INDIKATOR	Tahun								
		2007		2008		2009		2010		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pengangkutan dan Komunikasi terhadap PDRB (%)									
14	Kontribusi Sektor Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan terhadap PDRB (%)	2.59	2.59	2.44	2.28	2.30	2.39	2.16	4.00	
15	Kontribusi Sektor Jasa-jasa terhadap PDRB (%)	8.60	8.60	9.15	8.49	9.74	9.19	10.37	7.00	

Sumber: Target RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2007-2010), realisasi dari berbagai sumber (2007-2010)

Tabel II.4  
Rekapitulasi Realisasi Anggaran 2007 - 2011  
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,401,241,834	4,614,097,124	3,106,428,806	3,842,424,015	4,699,587,695	2,021,154,555	59	2,607,627,093	57	2,497,706,424	80	3,209,130,269	84	2,817,089,326	60	5,495,468,200
II	BELANJA LANGSUNG	9,756,823,040	7,249,849,534	4,121,715,520	6,662,551,650	5,683,506,000	7,486,293,991	77	4,286,117,814	59	3,668,268,535	89	5,397,893,843	81	1,848,028,952	33	6,575,406,000
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,487,750,400	1,889,452,200	1,729,129,220	1,676,992,000	2,703,804,000	1,164,904,216	78	1,361,552,514	72	1,619,688,060	94	1,593,021,943	95	938,587,752	35	1,930,376,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,480,000	14,700,000	9,996,000	35,996,000	45,000,000	4,108,800	25	4,099,700	28	7,063,840	71	35,987,340	100	26,318,500	58	45,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	111,600,000	148,100,000	94,000,000	150,000,000	168,000,000	74,674,616	67	87,435,264	59	65,488,230	70	133,884,903	89	104,298,052	62	241,000,000
3	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	-	53,200,000	26,275,000	-	300,000,000	-	-	32,295,000	61	25,525,000	97	-	-	-	-	240,000,000
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan	137,280,000	353,812,000	209,480,000	258,105,000	333,400,000	121,140,500	88	149,929,150	42	181,434,500	87	237,532,000	92	133,490,500	40	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012	
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011			
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Dinas/Operasional																	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	72,600,00 0	43,800,00 0	48,180,00 0	65,800,00 0	75,400,000	65,400,0 00	90	42,150,000	96	46,080,000	96	65,800,000	100		37,000,000	49	88,700,000
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	92,040,00 0	93,000,00 0	81,300,00 0	77,400,00 0	86,400,000	92,040,0 00	100	93,000,000	100	77,019,000	95	67,269,400	87		-	-	87,000,000
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	35,300,00 0	62,300,00 0	55,700,00 0	73,600,00 0	82,000,000	33,045,0 00	94	38,626,500	62	52,883,000	95	73,472,500	100		19,810,500	24	75,000,000
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	89,450,40 0	99,150,20 0	109,065,2 20	97,915,00 0	152,400,000	88,337,0 00	99	98,328,400	99	105,747,600	97	91,928,600	94		70,403,500	46	152,850,000
9	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	51,570,00 0	49,000,00 0	53,900,00 0	63,550,00 0	94,600,000	48,041,3 00	93	46,992,000	96	39,346,000	73	61,244,000	96		9,000,000	10	75,900,000
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	21,540,00 0	10,225,00 0	10,225,00 0	6,950,000	10,000,000	7,050,00 0	33	4,800,000	47	9,655,000	94	5,800,000	83		5,330,000	53	20,000,000
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	8,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
12	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan	14,448,00 0	21,462,00 0	23,600,00 0	23,010,00 0	28,100,000	11,577,0 00	80	15,267,000	71	22,826,390	97	18,456,500	80		18,169,000	65	45,000,000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012	
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011			
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Perundang-Undangan																	
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,120,000	8,400,000	9,240,000	22,866,000	27,004,000	6,120,000	100	8,160,000	97	3,450,000	37	22,020,000	96	5,682,000	21	18,426,000	
14	Penyediaan Makanan Dan Minuman	43,662,000	52,868,000	52,868,000	30,500,000	40,000,000	25,434,000	58	45,038,500	85	42,871,000	81	16,612,500	54	34,687,500	87	70,000,000	
15	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	514,600,000	645,400,000	720,000,000	639,300,000	525,000,000	446,256,000	87	565,886,000	88	719,998,500	100	635,014,200	99	314,224,200	60	550,000,000	
16	Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	181,200,000	130,000,000	125,300,000	32,000,000	78,000,000	131,300,000	72	78,300,000	60	120,300,000	96	29,000,000	91	45,000,000	58	71,500,000	
17	Survey Dan Pengumpulan Data	-	104,035,000	100,000,000	100,000,000	150,000,000	-	-	51,245,000	49	100,000,000	100	99,000,000	99	115,174,000	77	150,000,000	
18	Penataan Ruang Kantor	-	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Kunjungan Kerja ke Kabupaten/Kota	99,860,000	-	-	-	-	10,380,000	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	968,350,300	391,283,500	111,616,300	406,228,750	309,982,000	888,631,900	92	353,390,100	90	108,379,000	97	382,863,000	94	-	-	649,130,000	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012	
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011			
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Aparatur																	
20	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	81,185,800	97,500,000	-	-	-	77,119,900	95	90,825,000	93	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	85,794,500	77,619,000	66,616,300	78,010,000	-	73,339,000	85	61,425,000	79	64,575,000	97	77,200,000	99	-	-	-	-
22	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	700,000,000	99,750,000	-	-	280,000,000	637,257,000	91	93,740,000	94	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Pengadaan Meubelair	-	50,650,000	-	-	-	-	-	45,250,000	89	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,450,000
25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	87,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	86,546,000	99	14,900,000	99	14,744,000	98	-	-	-	-	-	115,350,000
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	2,970,000	3,000,000	-	-	-	2,970,000	100	3,000,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000,000

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012	
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011			
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
28	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	-	-	-	305,418,750		-						282,863,000	93				-
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329,330,000
31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir Dan Halaman Kantor	11,400,000	14,820,000	30,000,000	22,800,000	29,982,000	11,400,000	100	14,820,000	100	29,060,000	97	22,800,000	100	-	-	-	30,000,000
32	Pengadaan Alat Absensi Sidik Jari	-	32,944,500	-	-	-	-	-	29,430,100	89	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,600,000
33	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,600,000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012	
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011			
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
34	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	394,200,000	165,000,000	-	-	-	100,676,000	26	141,957,200	86	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	394,200,000	165,000,000	-	-	-	100,676,000	26	141,957,200	86	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20,000,000	27,100,000	-	55,800,000	-	19,575,000	98	25,322,500	93	-	-	43,300,000	78	-	-	-	100,000,000
36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	8,100,000	-	55,800,000	-	-	-	7,475,000	92	-	-	43,300,000	78	-	-	-	25,000,000
37	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	20,000,000	-	-	-	-	19,575,000	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000
38	Penyusunan Renstra Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGARAN 2012
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
39	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	-	19,000,000	-	-				17,847,500	94	-	-	-	-	-		
F	Program Pengembangan Data/Informasi	3,372,526,800	1,800,232,200	561,360,000	592,162,500	281,760,000	2,927,599,450	87	786,371,100	44	424,913,375	76	434,033,800	73	20,277,000	7	375,000,000
40	Pemeliharaan Akses Jaringan	-	-	72,850,000	-	-	-	-	-	-	68,362,000	94	-	-	-	-	-
41	Pengelolaan Website www.bangkabelitungprov.go.id	-	375,000,000	-	-	-	-	-	251,820,000	67	-	-	-	-	-	-	-
42	Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Harga Satuan Standar	139,442,700	-	150,000,000	-	-	108,880,000	78	-	-	89,450,375	60	-	-	-	-	-
43	Neraca Sumber Daya Alam (NSDA)	785,000,000	-	-	-	-	782,800,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Geografis (Geographical)	1,514,993,150	67,877,700	-	-	-	1,331,834,450	88	67,877,700	100	-	-	-	-	-	-	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Information System)																
45	Penyusunan Profile Daerah	111,714,000	132,940,000	106,510,000	127,685,000	152,580,000	103,774,000	93	115,313,500	87	101,946,000	96	115,410,000	90	20,277,000	13	150,000,000
46	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	430,924,250	-	-	-	-	264,200,000	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Update Aplikasi SEUPPD APBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000
48	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD)	-	217,808,500	-	128,800,000	-	-	-	26,218,500	12	-	-	114,270,000	89	-	-	-
49	Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (PDRB)	223,552,750	205,781,000	232,000,000	111,322,500	129,180,000	180,061,000	81	165,584,000	80	165,155,000	71	85,396,300	77	-	-	100,000,000
50	Indeks Pembangunan	166,899,9	163,110,0	-	136,335,0	-	156,050,	93	151,463,40	93	-	-	-	-	-	-	100,000,000

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50	00		00		000		0			-	71,025,000	52	-	-	
51	Pemetaan Desa Miskin	-	637,715,0 00	-	-	-	-	-	8,094,000	1	-	-	-	-	-	-	-
52	Penyusunan Buku Daerah Tertinggal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	88,020,00 0	-	-	-	-	-	-	-	47,932,500	54	-	-	-
G	Program Kerjasama Pembangunan	152,040,0 00	264,350,0 00	406,080,0 00	1,039,779, 000	1,012,960,0 00	65,427,2 50	43	138,632,50 0	52	343,893,500	85	967,537,000	93	442,535,900	44	400,000,000
53	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	152,040,0 00	264,350,0 00	166,325,0 00	336,024,0 00	395,300,000	65,427,2 50	43	138,632,50 0	52	121,688,000	73	272,517,500	81	172,612,900	44	400,000,000
54	Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan	-	-	89,755,00 0	218,625,0 00	-	-	-			73,210,000	82	213,620,000	98	-	-	-
55	Rapat Koordinasi dan Pertemuan Kerjasama Provinsi	-	-	150,000,0 00	-	-	-	-			148,995,500	99	-	-	-	-	-
56	Rapat Koordinasi Kerjasama	-	-	-	485,130,0 00	-	-	-					481,399,500	99	-	-	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012	
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011			
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pembangunan se- Wilayah BELAJASUMBA																	
57	Fasilitasi Sekretariat Sail Wakatobi-Belitong 2011	-	-	-	-	125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,245,000	44	-
58	Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Sail Wakatobi-Belitong 2011	-	-	-	-	492,660,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,678,000	44	-
H	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	440,535,000	532,662,000	304,470,000	1,081,926,400	400,000,000	271,825,900	62	158,830,000	30	279,735,800	92	789,108,300	73	166,851,300	42	100,000,000	
59	Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan PNPM PISEW Mandiri Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi Kep. Bangka Belitung	-	-	103,930,000	-	-	-	-	-	-	81,451,500	78	-	-	-	-	-	
60	Koordinasi Penetapan	123,085,0	179,600,0	-	-	-	50,165,0	41	65,495,000	36	-							

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Rencana Tata Ruang Berbatasan (Review RTRW)	00	00				00					-	-	-	-	-	-
61	Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (BKPRD)	122,450,000	248,062,000	-	932,781,000	-	54,015,000	44	-	-	-	-	671,977,000	72	-	-	-
62	Koordinasi Pengendalian Kawasan Tertentu Terbatas	120,000,000	105,000,000	-	-	-	96,560,000	80	93,335,000	89	-	-	-	-	-	-	-
63	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan	75,000,000	-	-	-	-	71,085,900	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian RTRW Prov. Kep. Babel	-	-	200,540,000	-	400,000,000	-	-	-	-	198,284,300	99	-	-	166,851,300	42	-
65	Fasilitasi BKPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
66	Monitoring, Evaluasi	-	-	-	149,145,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dan Pelaporan				00								117,131,300	79	-	-	-
I	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	74,922,500	-	-	-	-	-	29,574,400	39	-	-	-	-	-	-	149,100,000
67	Penyusunan Jabatan Fungsional Perencanaan Pembangunan Daerah	-	74,922,500	-	-	-	-	-	29,574,400	39	-	-	-	-	-	-	-
68	Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,100,000
J	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,529,803,600	1,191,963,734	1,009,060,000	1,298,615,000	850,000,000	837,939,125	55	813,119,500	68	891,658,800	88	885,135,700	68	279,777,000	33	2,448,800,000
69	Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2007-2012	279,670,000	-	-	-	-	233,940,000	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Penetapan RPJPD 2005-2025	175,890,000	-	-	-	-	126,290,000	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Penyusunan RPJMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012	
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011			
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
72	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	166,040,000	-	-	-	-	79,560,000	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000
73	Penetapan RPJMD	-	136,440,000	-	-	-	-	-	120,680,000	88	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Fasilitasi Tim Evaluasi Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	421,339,500	222,820,134	345,370,000	-	450,000,000	188,629,000	45	142,136,800	64	270,522,000	78	-	-	30,579,500	7	500,000,000	
76	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	-	8,100,000	-	483,575,000	-	-	-	6,445,500	80	-	-	352,366,500	73	-	-	-	
77	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI)	-	214,085,000	214,085,000	205,660,000	200,000,000	-	-	133,410,000	62	189,085,000	88	191,160,000	93	171,550,000	86	400,000,000	
78	Fasilitasi Kebijakan Nasional AMPL-BM	-	140,000,000	133,805,000	68,970,000	-	-	-	104,245,000	74	123,810,000	93	63,285,000	92	-	-	-	
79	Penyusunan RAD Pemberantasan Korupsi	-	170,075,000	-	-	-	-	-	122,113,800	72	-	-	-	-	-	-	-	
80	Penyusunan RKPD, KUA, PPAS	-	-	120,000,000	-	200,000,000	-	-	-	-	115,631,000	96	-	-	77,647,500	39	398,800,000	
81	Penyusunan Rancangan	251,404,1	118,023,0	50,000,000	-	-	53,505,1	21	31,478,800									

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	RKPD	00	00	0			25			27	48,622,000	97	-	-	-	-	-
82	Sosialisasi PP Nomor 8 Tahun 2008	-	-	25,000,000	-	-	-	-			23,846,000	95	-	-			
83	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	235,460,000	182,420,600	120,800,000	181,540,000	-	156,015,000	66	152,609,600	84	120,142,800	99	150,744,000	83	-	-	150,000,000
84	Penyusunan RKPD	-	-	-	46,850,000	-	-	-					46,230,000	99	-	-	-
85	Penyusunan KUA dan PPAS	-	-	-	82,020,000	-	-	-					81,350,200	99	-	-	-
86	Fasilitasi Riset dan Pembentukan Dewan Riset Daerah (DRP)	-	-	-	230,000,000	-	-	-					-	-	-	-	-
K	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	551,149,500	575,853,400	-	255,882,500	-	529,464,500	96	355,122,000	62	-	-	194,728,100	76	-	-	-
87	Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah	305,935,000	-	-	-	-	295,720,000	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Penyusunan Bisnis Plan	245,214,500	-	-	-	-	233,744,000	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Produk Unggulan Ikan	00					500					-	-	-	-		
89	Kajian Komoditi Unggulan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	372,299,00	-	-	-	-	-	355,122,000	95	-	-	-	-	-	-	-
90	Kajian Kinerja Pembangunan Sosial Ekonomi di Lima Provinsi se-Usia di Indonesia	-	203,554,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Kajian Tentang Penetapan Kawasan (Strategis, Andalan, Cepat Tumbuh, Industri)	-	-	-	255,882,500	-	-	-	-	-	-	-	194,728,100	76	-	-	-
L	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	840,467,440	337,030,000	-	255,165,500	125,000,000	680,250,650	81	122,246,000	36	-	-	108,166,000	42	-	-	525,500,000
92	Pendataan Penduduk Miskin	186,240,000	-	-	-	-	160,074,650	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Pembentukan Kerjasama Jaringan	52,935,000	-	-	-	-	43,490,000	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-

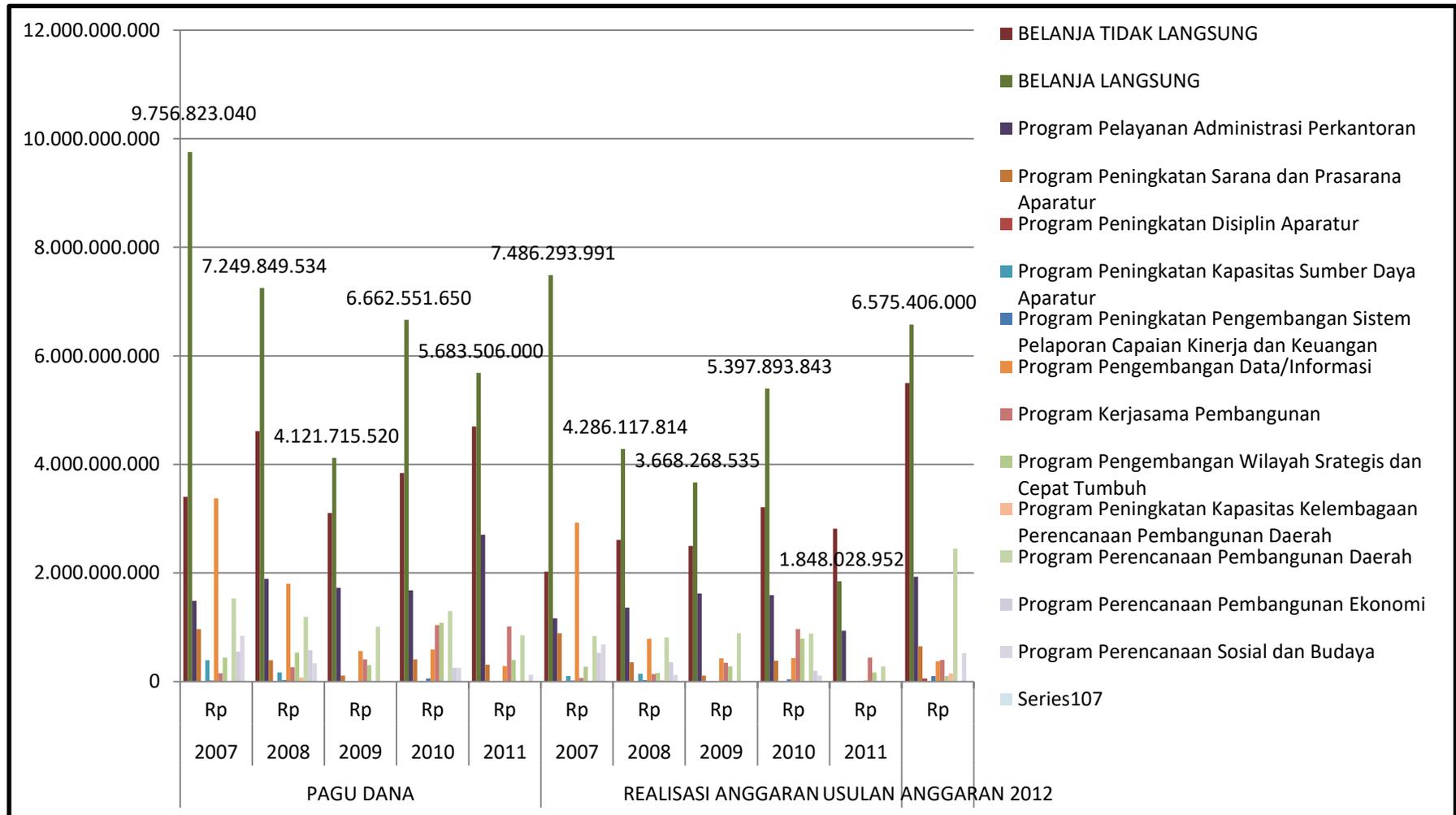
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012	
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011			
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Penelitian (Jarlit)																	
94	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	70,045,00	-	-	-	-	49,705,00	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Daerah Tertinggal (PDT)	119,320,00	-	-	-	-	82,910,00	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan III (P2KP-3)	137,180,00	-	-	-	-	83,578,500	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Fasilitasi dan Koordinasi Jaringan Penelitian dan pengembangan Bidang Pendidikan	-	185,030,00	-	158,443,00	-	-	-	65,686,800	36	-	-	72,705,500	46	-	-	-	-
98	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	152,000,00	-	-	-	-	-	56,559,200	37	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pelaksanaan Program Daerah Tertinggal (PDT), P2KP-3, Program PNPM dan PNPM PISEW																
99	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)	-	-	-	41,037,500	-	-	-	-	-	-	-	19,355,500	47	-	-	-
100	Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Prov Kep. Bangka Belitung	-	-	-	55,685,000	-	-	-	-	-	-	-	16,105,000	29	-	-	-
101	Penyusunan Dokumen Input Output (IO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,500,000
102	Penyusunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	274,747,440	-	-	-	-	260,492,500	95	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA					REALISASI ANGGARAN										USULAN ANGGAR AN 2012	
		2007	2008	2009	2010	2011	2007		2008		2009		2010		2011			
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
103	Fasilitasi dan Koordinasi Program Nasional di Provinsi Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000,000
TOTAL BELANJA		13,158,064,874	11,863,946,658	7,228,144,326	10,504,975,665	10,383,093,695	9,507,448,546	72	6,893,744,907	58	6,165,974,959	85	8,607,024,112	82	4,665,118,278	45	12,070,874,200	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011.

**Gambar II.3**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Tahun 2007-2012**



Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2007 – 2012 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2013, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang output yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* yang menunjang efektivitas program.
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD dan RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda**

Sampai saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbag Keuangan;
  - c. Subbag Perencanaan dan Evaluasi Program.
3. Unsur Pelaksana yaitu :
- a. Bidang Sosial dan Budaya yang terdiri dari Subbid Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan; Subbid Kependudukan dan Sumber Daya Manusia;
  - b. Bidang Ekonomi yang terdiri dari Subbid Dunia Usaha, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Subbid Pertanian, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
  - c. Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup yang terdiri dari Subbid Sarana dan Prasarana; Subbid Lingkungan Hidup;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang terdiri dari Subbid Pemerintahan; Subbid Otonomi Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah , tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Membuat perumusan kebijakan teknis bidang tata usaha, sosial budaya, perekonomian, sarana dan prasarana wilayah, pemerintahan dan aparatur, pendataan dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan;
- b. Menyusun pedoman teknis perencanaan pembangunan, kriteria teknis, norma standar, prosedur dan manual;

- c. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program perencanaan pembangunan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 - 2017 adalah sebagai berikut:

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (*reward and punishment*), dan kesejahteraan pegawai;
  - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi;
2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya; dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien;
  - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Bappeda dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan:
    - a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di semua bidang.
  4. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan:
    - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
    - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi lintas sektor, lintas daerah, dan lintas level pemerintahan.
  5. Strategi melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam bidang Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai bagian dari operasionalisasi perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
    - a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan *Geographical Information System (GIS)*, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada;
    - b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung segala bidang.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

---

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD**

Memperhatikan Bappeda sebagai PD yang berfungsi dalam koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, maka Bappeda memiliki posisi strategis dalam merumuskan arah kebijakan perencanaan daerah guna mendukung perencanaan pembangunan nasional. Acuan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah merubah pola perencanaan dimana sebelumnya proses perencanaan yang bersifat sentralistik dan *top down* menjadi proses perencanaan yang dilakukan dengan memadukan berbagai pendekatan yaitu politis, teknokratis, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Kombinasi, keterpaduan dan kesinambungan proses perencanaan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tersebut diharapkan dapat melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan merubah paradigma dari sebelumnya masyarakat sebagai objek pembangunan menjadi subjek pembangunan.

Keterlibatan seluruh masyarakat untuk mengawal arah pembangunan daerah agar berjalan dan terlaksana dengan baik akan terwujud apabila disusun perencanaan yang sinergis dan terintegrasi serta memperhatikan keberlanjutan proses perencanaan. Akibat perubahan pola serta kondisi perencanaan yang diinginkan kedepan, maka akan berimplikasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2007-2012 serta tantangan yang semakin berat pada tahun 2012-2017,

maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

### **3.1.1 Masalah yang bersifat internal**

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia fungsional perencana pembangunan di Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Hal ini dipengaruhi oleh :
  1. Dalam hal kuantitas, belum terealisasinya secara menyeluruh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang salah satu substansinya bahwa semua Aparatur Sipil Negara menduduki jabatan fungsional, sedangkan jabatan struktural dihapuskan, selain itu kuota pemanggilan peserta diklat fungsional perencana sebagai syarat utama dapat dilantik sebagai fungsional perencana dari Bappenas dibatasi untuk setiap daerah,
  2. Dalam hal kualitas, sering terjadi tumpang tindih pekerjaan/ tugas antara struktural dengan fungsional, selanjutnya masih minim dan terbatasnya kesempatan untuk mengikuti diklat non gelar dibidang perencanaan untuk meningkatkan kompetensi perencana, karena pemanggilan peserta diklat ditentukan kuotanya oleh pihak penyelenggara, dan yang juga berpengaruh terhadap kualitas SDM yaitu anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur di Bappeda Prov. Kep. Babel masih sangat terbatas.
- b. Belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan dan kualitas penyelesaian tugas. Hal ini dipengaruhi oleh tidak berimbangnya jumlah CPNS yang ditempatkan di Bappeda setiap tahunnya dengan perencanaan kebutuhan sarana prasarana tahun sebelumnya, artinya CPNS yang masuk tidak diiringi dengan ketersediaan sarana prasarana yang ada

dan perencanaan kebutuhannya pun tidak diiringi dengan kecukupan anggaran (anggaran terbatas).

- c. Belum maksimalnya pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas serta adanya tumpang tindih tupoksi dan program/kegiatan dengan PD lainnya.

### **3.1.2 Masalah yang bersifat eksternal**

- a. Lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah pembangunan yang memerlukan koordinasi. Hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan PD di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan instansi vertikal.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut akan mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh belum mantapnya mekanisme pelaksanaan musrenbang provinsi, hasil reses Dewan yang tidak terakomodir pada saat Musrenbang, dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya tidak pernah dilibatkan dalam forum musrenbang.
- c. Belum dipahami secara baik proses dan mekanisme perencanaan oleh setiap PD. Hal ini mempengaruhi penyusunan dokumen perencanaan sehingga hasilnya kurang sinergis dan terintegrasi. Hal ini dipengaruhi oleh *mindset* PD yang beranggapan bahwa perencanaan itu tidak terlalu penting, karena yang terpenting menurut mereka adalah percepatan penyelesaian proyek/kegiatan, dan urusan perencanaan bukan tupoksi mereka, melainkan tupoksi Bappeda saja, padahal di semua struktur organisasi PD ada subbagian perencanaan. Diklat, bimtek, FGD, seminar, workshop dan sosialisasi bidang

- perencanaan dari pusat (Bappenas atau Kemendagri) dan daerah jarang melibatkan/ mengikutsertakan PD teknis.
- d. Masih munculnya "ego-sektoral" dalam penyusunan dokumen perencanaan, terutama yang berasal dari PD dan instansi vertikal serta lembaga DPRD. Hal tersebut akan berdampak kepada terhambatnya pencapaian indikator pembangunan daerah yang memerlukan dukungan seluruh pihak dalam penyusunan dokumen perencanaan hingga dokumen anggaran. Hal ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa dokumen perencanaan disusun oleh Bappeda untuk kebutuhan Bappeda sendiri untuk menyelesaikan tupoksi.
  - e. Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut dipengaruhi oleh lemahnya kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan di lingkungan PD dan belum terisnya kelompok jabatan fungsional di masing-masing PD baik fungsional perencana maupun fungsional tertentu lainnya, misalnya fungsional arsiparis, pranata komputer dan lain sebagainya.
  - f. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan. Hal ini dipengaruhi oleh penilaian suatu kebijakan program dan kegiatan masih bersifat penilaian realisasi fisik dan keuangan saja, belum menyentuh analisis mendalam terkait dengan hasil dan manfaat dari kebijakan/program/kegiatan. Sehingga akan berdampak pada penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya.
  - g. Belum maksimalnya pemanfaatan dan penataan ruang di wilayah provinsi. Hal ini disebabkan karena belum konsistennya daerah terhadap pelaksanaan RTRW dan belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen pembangunan spasial.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD Tahun 2012-2017**

Memperhatikan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan tahun 2012- 2017 adalah:

1. Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA)
2. Lingkungan Hidup;
3. Sarana dan Prasarana;
4. Sumber Daya Manusia dan Kependudukan;
5. Pemerintahan; dan
6. Sosial, Budaya dan Politik

Pada tahap pembangunan lima tahun kedua, pemerintah diharapkan lebih memfokuskan perhatiannya pada kebijakan dan upaya konkrit untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Sesuai dengan visinya, maka perhatian utama diberikan pada bidang-bidang yang akan berdampak kuat dan luas pada pembangunan agri-bahari, yaitu perkebunan, perikanan dan pariwisata. Di samping itu, pada tahap ini juga sudah mulai dirintis pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil produk perkebunan dan perikanan.

Strategi pembangunan yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan perhatian khusus pada percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan), sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal disekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Kerjasama pengembangan ekonomi harus dirintis tidak saja sebatas antar kabupaten/kota dalam provinsi, tetapi juga dengan daerah-daerah lain di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam proses pembangunan ekonomi ini, pemerintah hendaknya tetap menerapkan kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Di samping itu, penyelesaian masalah kerusakan lingkungan hidup diyakini tidak dapat diselesaikan dalam 5 (lima) tahun pertama dan karenanya kebijakan dan upaya konkrit tersebut tetap harus diupayakan pada lima tahun kedua dan seterusnya.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017 adalah:

**“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”**

Peran Bappeda sebagai unsur pelaksana perencanaan pembangunan diharapkan mampu mewujudkan visi tersebut melalui perencanaan dan pengendalian pembangunan di segala bidang. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 - 2017, yaitu:

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh
5. Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government

Berdasarkan misi tersebut Bappeda dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah ikut berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyusunan rencana

pembangunan daerah yang berkualitas serta melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota**

Telaahan Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra PD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing PD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Bappeda menjalankan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan, secara khusus melakukan perumusan kebijakan, pembinaan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi (monev) yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Masing-masing lembaga perencana baik ditingkat pusat maupun provinsi melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Berdasarkan potensi dan permasalahan serta tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pengembangan struktur ruang wilayah diarahkan untuk:

- Memperkuat kualitas prasarana dan sarana wilayah, khususnya sistem transportasi dan pusat-pusat pelayanan, dalam rangka pembangunan yang berkeimbangan.
- Memperkuat kualitas prasarana dan sarana kawasan-kawasan potensial.
- Memperkuat prasarana dan sarana yang berorientasi lingkungan.

Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dengan kebijakan, rencana, dan/atau program. Oleh karena itu dalam rangka mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka Bappeda berfungsi dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga alokasi kegiatan sektoral selaras dengan peruntukan ruang.

Bappeda selaku instansi perencanaan pembangunan daerah harus mampu merumuskan setiap kebijakan maupun rencana pembangunan agar selaras dengan tata ruang wilayah maupun implikasinya terhadap lingkungan hidup.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang perencanaan pembangunan secara umum, maka isu strategis yang berkembang

sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

1. Dokumen perencanaan belum memenuhi substansi perencanaan yang baik,;
2. Meningkatnya tuntutan terhadap kualitas perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Masih lemahnya koordinasi antara Bappeda dan PD dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
4. Belum optimalnya mekanisme pembahasan di level Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD;
5. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
6. Belum mantapnya kapasitas perencana dalam merumuskan dan menentukan program/kegiatan prioritas;
7. Indikator capaian program/ kegiatan yang tidak terukur dan masih bersifat kualitatif;
8. Kurang sinkronnya dokumen perencanaan antara RPJMD dengan RKPD, Renstra dengan Renja.

Selanjutnya identifikasi berikut analisa disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.1

Identifikasi dan Analisa Kekuatan Bappeda

<b>No.</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>POTENSI (%)</b>	<b>SKOR</b>	<b>SKOR TERTIMBANG</b>
1	Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai.	20	4	0,80
2	Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai.	15	3	0,45
3	Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja.	20	4	0,80

4	Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan.	30	4	1,20
5	Tingginya kemampuan koordinasi lintas bidang.	15	4	0,60
	TOTAL	100		3,85

Skor skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Tabel III.2

Identifikasi dan Analisa Kelemahan Bappeda

No.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Kurang tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.	20	4	0,80
2	Kurang terisinya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan.	20	3	0,60
3	Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan dan manajemen pelayanan publik.	20	3	0,60
4	Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang daerah.	25	4	1,00
5	Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.	15	4	0,60
	TOTAL	100		3,60

Skor skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Tabel III.3

## Identifikasi dan Analisa Peluang Bappeda

No.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah.	15	4	0,60
2	Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur terhadap Bappeda.	20	4	0,80
3	Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Bappeda.	30	5	1,50
4	Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan.	25	3	0,75
5	Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.	10	3	0,30
	TOTAL	100		3,95

Skor skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Tabel III.4

## Identifikasi dan Analisa Ancaman Bappeda

No.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Lemahnya koordinasi antar PD.	25	5	1,25
2	Meningkatnya tuntutan	20	4	0,80

No.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
	masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.			
3	Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat PD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran berbasis kinerja.	20	4	0,80
4	Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.	20	4	0,80
5	Lemahnya sinergi program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.	15	3	0,45
	TOTAL	100		4,10

Skor skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Tabel III.5

Skor Tertimbang Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal Bappeda

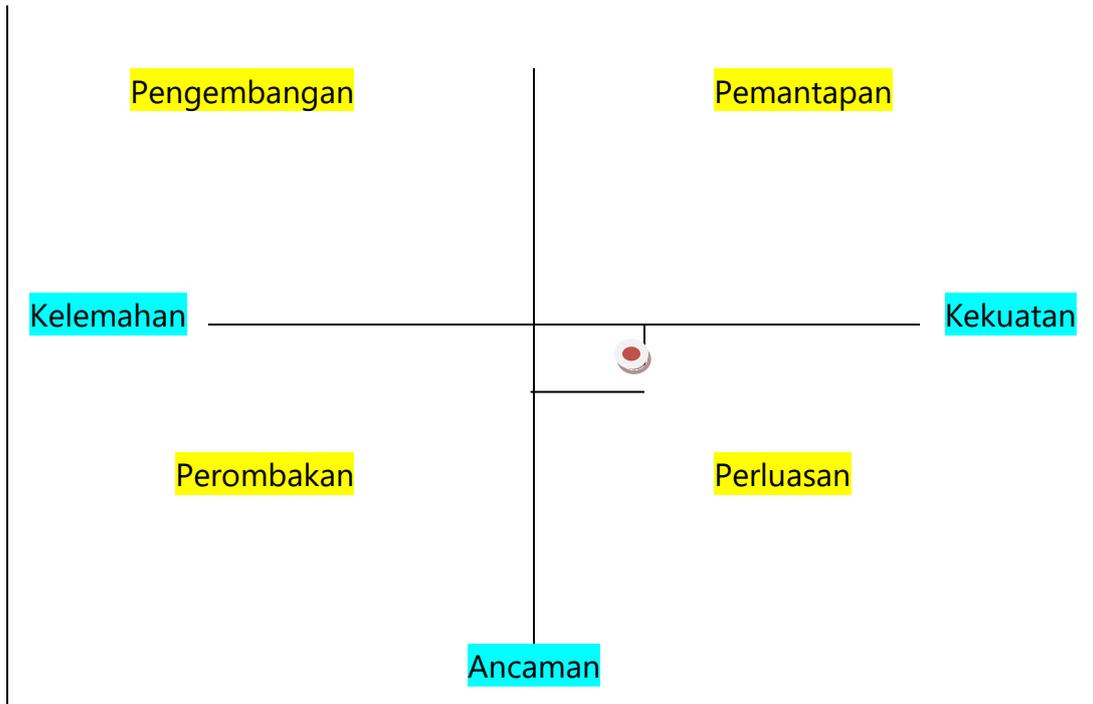
Indikator	Skor Tertimbang	Indikator	Skor Tertimbang
Kekuatan	3,85	Peluang	3,95
Kelemahan	3,60	Ancaman	4,10
<b>KESEIMBANGAN</b>	<b>0,25</b>	<b>KESEIMBANGAN</b>	<b>-0,15</b>

Gambar III.1

Posisi Bappeda

Hasil Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal

<b>Peluang</b>
----------------



Tabel III.8 berikut menyajikan Penentuan Alternatif Strategi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel III.6

Penentuan Alternatif Strategi Bappeda  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

<p>Faktor Internal</p>	<p><u>Kekuatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya jumlah sumber daya manusia memadai.</li> <li>2. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai.</li> <li>3. Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja.</li> <li>4. Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan.</li> <li>5. Kemampuan berkoordinasi lintas bidang.</li> </ol>	<p><u>Kelemahan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.</li> <li>2. Kurang terisinya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan.</li> <li>3. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan dan</li> </ol>
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Faktor Eksternal</p>		<p>manajemen pelayanan public.</p> <p>4. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang daerah.</p> <p>5. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.</p>
<p><u>Peluang:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>2. Adanya dukungan yang kuat dari gubernur terhadap Bappeda.</li> <li>3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Bappeda.</li> <li>4. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan.</li> <li>5. Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah</li> </ol>	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong penyusunan program/kegiatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Perluasan kompetensi SDM Perencana.</li> <li>3. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan.</li> <li>4. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan.</li> <li>5. Penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>6. upaya pemanfaatan</li> </ol>	<p>Strategi menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan.</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi informasi dan SIM dalam perencanaan pembangunan.</li> <li>3. Melakukan analisis, penelitian, pengembangan dan optimalisasi pengelolaan data/informasi perencanaan.</li> <li>4. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta kajian dalam pemanfaatan</li> </ol>

	potensi daerah yang ada.	potensi daerah.
<p><u>Ancaman:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya koordinasi antar PD.</li> <li>2. Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.</li> <li>3. Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat PD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran berbasis kinerja.</li> <li>4. Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.</li> <li>5. Lemahnya sinergi program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.</li> </ol>	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan perencanaan partisipatif.</li> <li>2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan antar PD.</li> <li>3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar daerah.</li> <li>4. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana.</li> </ol>	<p>Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.</li> <li>2. Meningkatkan, survei, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan.</li> <li>3. Peningkatan kualitas pelaporan dan capaian akuntabilitas kinerja.</li> </ol>

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

---

#### **4.1. Visi dan Misi**

Visi Bappeda adalah gambaran arah pembangunan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana disebutkan dalam Bab II, memperhatikan visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2012 – 2017, dan merujuk pada salah satu agenda prioritas nasional (NAWACITA) yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya maka Visi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 – 2017 adalah **“Terwujudnya badan perencana yang andal, akuntabel, koordinatif, partisipatif dan inovatif dalam mendukung pembangunan daerah.”**

Arti dan makna yang dimaksud adalah:

- Perencanaan yang andal mengandung makna bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan mengutamakan sikap profesional, rasional, efektif dan efisien.
- Perencanaan yang akuntabel berarti bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan transparan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Perencanaan yang koordinatif ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara

efektif dan efisien. Perencanaan ini mempunyai cakupan semua aspek operasi suatu sistem yang meminta ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

- Perencanaan yang partisipatif berarti bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan mengutamakan kerjasama, kemitraan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik satuan kerja perangkat daerah, masyarakat sipil, partai politik, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun organisasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
- Perencanaan inovatif berarti perencanaan yang dilakukan melalui proses analisis dan kajian yang mendalam serta mengutamakan kebaruan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.
- Perencanaan pembangunan daerah bermakna bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah secara optimal dengan memperhatikan pemerataan dan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi Bappeda tersebut dituangkan dalam misi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 – 2017 sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data dan informasi serta pengetahuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah.
2. Mengembangkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan.

3. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Misi pertama mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data dan informasi serta pengetahuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah merupakan upaya meningkatkan kinerja Bappeda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Misi kedua mengembangkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan dilakukan dengan mengkoordinasikan pelaksanaan program nasional.

Misi keempat melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan melakukan perumusan dan analisis terhadap kebijakan perencanaan pembangunan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan pembangunan makro, sektoral dan spasial.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan merupakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran dirumuskan dengan memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda.

- Misi I : Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data dan informasi serta pengetahuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah
- Tujuan: Terwujudnya rencana pembangunan daerah yang berkualitas
- Sasaran: Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas  
Meningkatkan sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD
- Misi II : Mengembangkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan
- Tujuan: Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD, akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat Sipil, antarwilayah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan.
- Sasaran: Penyusunan program/kegiatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan
- Misi III : Melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah
- Tujuan : Meningkatkan koordinasi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan makro, sektoral dan spasial.
- Sasaran: Meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja sesuai misi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk masa 5 (lima) tahun rencana disajikan dalam tabel V.1.

Tabel V.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja  
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			I	II	III	IV	V
Misi I : Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data dan informasi serta pengetahuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah							
Terwujudnya rencana pembangunan daerah yang berkualitas	Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (%)	60	65	70	75	-
		Persentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD (%)	60	65	70	75	-
		Persentase ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD	-	-	-	-	80
		Persentase ketaatan terhadap RTRW	55	60	65	70	75
		Persentase pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	60	65	70	75	80

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			I	II	III	IV	V
	Meningkatnya sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (%)	-	-	-	-	80
		Persentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD (%)	-	-	-	-	80
Misi II : Mengembangkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan							
Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD, akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat Sipil, antarwilayah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	65	70	75	80	85
Misi III: Melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah							
Meningkatkan	Meningkatnya	Persentase	50	55	60	65	70

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			I	II	III	IV	V
koordinasi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan makro, sektoral dan spasial	kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah	penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan					

### 4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel V.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi : Terwujudnya badan perencana yang andal, akuntabel, koordinatif, partisipatif dan inovatif dalam mendukung pembangunan daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi I : Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data dan			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
informasi serta pengetahuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah			
Terwujudnya rencana pembangunan daerah yang berkualitas	Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan sesuai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah	Menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kelompok rawan sosial dengan sinergitas semua sektor
			Menyusun kebijakan pelaksanaan program OVOP dengan sinergitas semua sektor
		Memanfaatkan sarana dan prasarana secara maksimal dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan	Melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana operasional dalam proses perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi
		Mengembangkan kebutuhan SDM perencanaan sesuai Struktur Organisasi	Melakukan analisis kebutuhan pegawai.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		dan Tata Kerja	
		Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional perencana dan teknis lainnya
		Memperluas jumlah cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi daerah	Membangun sistem data pembangunan daerah
			Peningkatan cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi daerah
		Penguatan pengaturan penataan ruang	Pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang, harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah
			Mempercepat pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Melakukan koordinasi pengembangan wilayah perbatasan
	Meningkatnya sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD	Mendorong penyusunan program/kegiatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan	Melakukan analisis kebijakan program kegiatan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan manajemen perencanaan dan penganggaran	Merumuskan standar operasional prosedur perencanaan pembangunan daerah
Misi II : Mengembangkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan			
Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD, akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat Sipil, antarwilayah,	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan	Mengkoordinasikan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan dokumen perencanaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
antarsektor dan antartingkat pemerintahan			
			Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama pemerintah dan swasta lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antar pelaku
			Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan
Misi III: Melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah			
Meningkatkan koordinasi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan makro, sektoral dan spasial	Meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan	Melakukan perumusan dan analisis terhadap kebijakan perencanaan pembangunan melalui penelitian dan pengembangan	Penyusunan perencanaan pembangunan makro, sektoral dan spasial yang berbasis penelitian dan pengembangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	daerah		Perluasan kerjasama penelitian dan pengembangan
			Penerapan implementasi kebijakan perencanaan pembangunan yang berbasis penelitian dan pengembangan

## **B A B V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

---

Dalam bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan disusun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai unsur pelaksana perencanaan pembangunan yang mencakup perencanaan makro secara terpadu.

Indikator kinerja menjadi alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja Bappeda dirumuskan dengan mempertimbangkan unsur perencanaan, pengendalian dan tata ruang sesuai dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012-2017 disajikan pada Tabel V.1.

**Tabel V.1**  
**Rencana Program/Kegiatan Beserta Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran**  
**Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017**

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN
			2013		2014		2015		2016		2017		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Gaji dan Tunjangan Pegawai		5.539.755.050		6.112.389.487		6.779.744.847		7.262.328.292		7.443.886.499	Pegawai Bappeda
	BELANJA LANGSUNG			11.267.903.350		12.157.944.000		15.409.733.300		15.787.090.500		17.255.513.550	
	Belanja Operasional			2.987.274.550		4.377.797.000		5.495.812.500		4.226.590.000		4.538.963.000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.468.884.550	100%	2.595.957.000	100%	2.978.732.500	100%	2.879.220.000	100%	3.167.142.000	Lingkungan internal dan eksternal SKPD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu terlaksananya penyediaan materai dan jasa paket pengiriman	12 bulan	49.500.000	12 bulan	64.150.000	12 bulan	11.600.000	12 bulan	16.000.000	12 bulan	17.600.000	Institusi pemerintah dan masyarakat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Waktu terlaksananya pembayaran tagihan listrik, telepon dan internet	12 bulan	204.840.000	12 bulan	223.200.000	12 bulan	396.000.000	12 bulan	407.520.000	12 bulan	448.272.000	Kantor, pegawai Bappeda

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Waktu terlaksananya dukungan pelayanan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	425.000.000	12 bulan									Kantor, pegawai Bappeda
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu tersedianya jasa administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan	111.750.000	12 bulan	176.550.000	12 bulan	242.400.000	12 bulan	200.220.000	12 bulan	220.242.000	Pegawai Bappeda	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu terpeliharanya kebersihan kantor BAPPEDA Provinsi	12 bulan	95.000.000	12 bulan	115.800.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	33.000.000	Kantor, pegawai Bappeda	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Waktu terpeliharanya peralatan kantor	12 bulan	94.250.000									Peralatan kerja, pegawai Bappeda	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Waktu tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja			12 bulan	164.350.000	12 bulan	190.000.000	12 bulan	140.000.000	12 bulan	154.000.000	Peralatan kerja, pegawai Bappeda	

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN
			2013		2014		2015		2016		2017		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	223.734.550	12 bulan	240.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	220.000.000	Pegawai Bappeda
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Waktu tersedianya barang cetakan, penggandaan surat/dokumen lainnya	12 bulan	76.250.000	12 bulan	74.200.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	71.500.000	Pegawai Bappeda
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	23.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	33.000.000	Kantor, Pegawai Bappeda
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu tersedianya surat kabar/majalah, dan buku perpustakaan	12 bulan	45.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	88.400.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	Pegawai Bappeda
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu tersedianya bahan logistik (tabung gas, air galon, tabung pemadam kebakaran, obat-obatan)	12 bulan	12.810.000	12 bulan	15.120.000	12 bulan	16.432.500	12 bulan	35.280.000	12 bulan	38.808.000	Pegawai Bappeda
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Waktu tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tamu	12 bulan	120.000.000	12 bulan	115.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	110.000.000	Pegawai Bappeda dan tamu lainnya

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN
			2013		2014		2015		2016		2017		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Waktu tersedianya pelayanan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	750.000.000	12 bulan	1.072.437.000	12 bulan	905.000.000	12 bulan	750.000.000	12 bulan	825.000.000	Daerah di luar Prov Kep Babel/ Pegawai Bappeda
	Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang terbayar honorariumnya	5 orang	87.750.000	7 orang	150.150.000	20 orang	438.900.000	24 orang	655.200.000	24 orang	720.720.000	Tenaga kontrak Bappeda
	Survey Dan Pengumpulan Data	Waktu terlaksananya survey dan pengumpulan data	12 bulan	150.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	200.000.000					Daerah Kab/Kota se-Prov Kep Babel/ Pegawai Bappeda
	Koordinasi, Konsolidasi ke dalam daerah	Waktu terlaksananya koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah							12 bulan	200.000.000	12 bulan	220.000.000	Daerah Kab/Kota se-Prov Kep Babel/ Pegawai Bappeda

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN
			2013		2014		2015		2016		2017		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kelancaran tupoksi	100%	466.310.000	100%	1.725.290.000	100%	2.424.120.000	100%	1.247.110.000	100%	1.371.821.000	Pegawai Bappeda
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia					8 Unit sepeda motor, 2 Unit kendaraan roda empat	591.120.000					Kendaraan roda empat dan dua di Bappeda/ Pegawai Bappeda
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang tersedia		-	1 unit genset, 1 unit tempat parkir	555.400.000	6 lemari, 1 paket teralis besi jendela, 10 meja kerja, 2 meja rapat, 6 set sofa, 2 meja resepsionis	313.950.000	1 unit tempat parkir	203.000.000		223.300.000	Kantor Bappeda/ Pegawai Bappeda

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor tersedia			14 laptop, 6 printer, 10 UPS, 15 PC unit, 2 layar proyektor berdiri, 2 layar proyektor gantung, 1 handycam, 2 kamera digital, 1 set mik wireless, 1 unit soundsystem, 1 unit telp PABX	464.500.000				3 karpets, 1 mesin jilid, 7 AC, 1 mesin laminating, 11 lemari, 10 filling kabinet, 1 mesin pompa air, 8 PC, 6 printer, 1 scanner, 12 UPS, 48 kursi rapat, 4 set kursi tunggu, 3 dispenser, 1 set sound system, 2 GPS	468.610.000		515.471.000	Kantor Bappeda/ Pegawai Bappeda

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN
			2013		2014		2015		2016		2017		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Waktu terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	40.000.000	12 bulan	153.800.000	12 bulan	235.500.000	12 bulan	31.110.000	12 bulan	34.221.000	Kantor Bappeda/ Pegawai Bappeda
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (pajak, BBM, service)	7 unit mobil, 11 unit motor	384.760.000	7 unit mobil, 11 unit motor	427.690.000	7 unit mobil, 11 unit motor	449.350.000	9 unit mobil, 19 unit motor	494.390.000		543.829.000	Kendaraan Dinas/ Pejabat Eselon II, III, IV dan staf Bappeda
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir Dan Halaman Kantor	Waktu terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman kantor	12 bulan	41.550.000	12 bulan	123.900.000	12 bulan	59.200.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	Halaman Kantor Bappeda/ Pegawai Bappeda
	Pengadaan Genset dan Perlengkapannya	Jumlah genset dan perlengkapannya yang tersedia					1 unit	475.000.000					Kantor Bappeda/ Pegawai Bappeda
	Penyusunan DED Pengembangan Gedung Kantor	Tersedianya DED Pengembangan Gedung Kantor					1 DED	300.000.000					Kantor Bappeda/ Pegawai Bappeda

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Prosentase peningkatan sarana penunjang disiplin aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>8.450.000</b>			<b>100%</b>	<b>92.960.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.260.000</b>			<b>0</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai/PSH/PSL/PDH yang tersedia	5 stel PSH pejabat eselon III	8.450.000			206 stel PDH	92.960.000						Pegawai Bappeda
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian hari-hari tertentu (batik/baju melayu)							200 pakaian olahraga dan batik daerah	100.260.000				Pegawai Bappeda
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Prosentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>43.630.000</b>	<b>100%</b>	<b>56.550.000</b>							<b>0</b>	

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahun 2013 dan jam lembur		-	4 dokumen (Renja, LAKIP, Lap keuangan bulanan dan semester, tahunan), 4410 jam lembur	56.550.000								Pegawai Bappeda
	Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, dan Laporan Tahunan SKPD	Jumlah Dokumen Renja, LAKIP, dan Laporan Tahunan SKPD	75 buku/dokumen	43.630.000										Pegawai Bappeda
	<b>URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG</b>					<b>532.250.000</b>		<b>403.944.100</b>		<b>383.085.000</b>		421.393.500		
	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase meningkatnya sinkronisasi perencanaan tata ruang			75%	532.250.000	80%	403.944.100	85%	383.085.000	90%	421.393.500		

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah peserta sosialisasi RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			500 orang	376.480.000								Pegawai Bappeda, SKPD, Stakeholder
	Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Frekuensi rapat koordinasi tim BKPRD			7 kali	155.770.000				383.085.000		421.393.500		Pegawai Bappeda, SKPD, Stakeholder
	Fasilitasi dan Rakor BKPRD	Waktu terlaksananya fasilitasi dan koordinasi BKPRD					12 bulan	403.944.100						Pegawai Bappeda, SKPD, Stakeholder
	<b>URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>			<b>8.280.628.800</b>		<b>7.247.897.000</b>		<b>8.066.427.700</b>		<b>6.982.295.500</b>		<b>9.495.525.050</b>		
	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	60%	<b>445.800.000</b>	65%	<b>573.550.000</b>								

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersedia	1 dokumen (60 buku)	150.000.000										Pegawai Bappeda, SKPD, Stakeholder
	Penyusunan Profile Daerah	Jumlah dokumen BBDA yang tersedia	1 dokumen (100 buku)	150.000.000										Pegawai Bappeda, SKPD, Stakeholder
	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) dan Raperda yang tersedia		-	3 aplikasi (SEUPPD, e-Monev, website Bappeda)	573.550.000								Pegawai Bappeda, SKPD, Stakeholder

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Indeks Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen IPD yang tersedia (data keberhasilan pembangunan yang meliputi aspek keberdayaan pemerintah, perkembangan wilayah dan keberdayaan masyarakat)	1 dokumen (50 buku)	145.800.000										Pegawai Bappeda, SKPD, Stakeholder
	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>		<b>60%</b>	<b>1.334.330.000</b>	<b>65%</b>	<b>1.045.412.000</b>	<b>70%</b>	<b>374.314.000</b>	<b>75%</b>	<b>315.000.000</b>	<b>80%</b>	346.500.000		
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah kesepakatan kerja sama pembangunan antar daerah (se-Prov Kep Babel dan se-Sumatera)	5 kesepakatan kerjasama	477.000.000	4 kesepakatan kerjasama	311.416.000	4 kesepakatan kerjasama	374.314.000		315.000.000		346.500.000	SKPD dan stakeholder Prov/kab/Kota	

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN
			2013		2014		2015		2016		2017		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Fasilitasi Pelaksanaan Rakor Forum Gubernur se-wilayah Sumatera	Jumlah rakor forum Gubernur se-wilayah Sumatera (kerjasama pembangunan wilayah Sumatera) yang terlaksana	1 kali rakorgub, 3 kali rapat tim teknis	857.330.000								0	SKPD dan stakeholder Provinsi Sumatera
	Rapat Teknis Forum Kerjasama Gubernur se-Sumatera	Jumlah rapat tim teknis dan jumlah rekomendasi			3 kali rapat, 3 rekomendasi	733.996.000							SKPD dan stakeholder Provinsi Sumatera
	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>				65%	599.225.000							
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perbatasan	Dokumen masterplan ibukota provinsi			ada (1 dokumen)	599.225.000							SKPD dan stakeholder Prov/kab/Kota
	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sarpra dan LH terhadap RPJMD</b>	60%	730.730.000	65%	499.580.000	70%	104.285.000	75%	108.880.000	80%	119.768.000	

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen kajian kawasan Strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi			1 dokumen	499.580.000								SKPD dan stakeholder Prov/kab/Kota
	Fasilitasi BKPRD	Frekuensi rapat koordinasi BKPRD yang terlaksana	6 kali	100.000.000										SKPD dan stakeholder Prov/kab/Kota
	Review Masterplan Kompleks Perkantoran	Jumlah masterplan kompleks perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersedia	1 masterplan	630.730.000									0	SKPD dan stakeholder
	Koordinasi Pengendalian Kawasan Tertentu Terbatas	Jumlah kawasan tertentu terbatas yang terkendali dan jumlah rekomendasi pemanfaat lahan yang dikeluarkan					1 kawasan, 5 rekomendasi	104.285.000		108.880.000			119.768.000	SKPD dan stakeholder Prov/kab/Kota

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN
			2013		2014		2015		2016		2017		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar</b>	<b>Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sarpra dan LH terhadap RPJMD</b>	<b>60%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>65%</b>	<b>294.278.000</b>	<b>70%</b>	<b>373.110.900</b>	<b>75%</b>	<b>274.812.000</b>	<b>80%</b>	<b>302.293.200</b>	
	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Jumlah laporan terfasilitasi program AMPL Nasional di 7 kab/kota	1 laporan (5 buku)	150.000.000	1 dokumen (25 buku)	294.278.000	1 laporan, 1 dokumen RAD AMPL, 7 kab/kota	293.245.900		274.812.000		302.293.200	SKPD dan stakeholder Prov/kab/Kota
	Koordinasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Jumlah dokumen tentang informasi penurunan emisi GRK pada 7 kab/kota					7 dokumen	79.865.000					SKPD dan stakeholder Prov/kab/Kota
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Peningkatan manajemen program dan aparatur untuk kelancaran dan efektifitas tugas pokok dan fungsi Bappeda</b>	<b>60%</b>	<b>121.550.000</b>	<b>65%</b>	<b>283.650.000</b>	<b>70%</b>	<b>346.500.000</b>	<b>75%</b>	<b>406.336.000</b>	<b>80%</b>	<b>446.969.600</b>	

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aparatur perencana yang mengikuti bimtek dalam rangka meningkatkan kapasitas	20 aparatur	121.550.000	25 aparatur	118.650.000								Pegawai Bappeda
	Penyusunan sistem manajemen mutu perencanaan pembangunan daerah	Jumlah SOP yang tersusun		-	1 SOP	126.200.000								Pegawai Bappeda
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti bimtek, workshop, diklat dan jumlah PFP yang dinilai AK nya					30 PNS dan 6 PFP	346.500.000	20 PNS dan 20 PFP	406.336.000		446.969.600		Pegawai Bappeda dan PFP kab/kota
							30 PNS dan 6 PFP	346.500.000	20 PNS dan 20 PFP	406.336.000		446.969.600		Pegawai Bappeda dan PFP kab/kota

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN
			2013		2014		2015		2016		2017		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							30 PNS dan 6 PFP	346.500.000	20 PNS dan 20 PFP	406.336.000		446.969.600	Pegawai Bappeda dan PFP kab/kota
	Fasilitasi Jabatan Fungsional Perencana BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah aparatur fungsional perencana yang dinilai kinerjanya			5 PFP	38.800.000							Pegawai Bappeda
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian pencapaian sasaran tahunan terhadap RPJMD</b>	<b>60%</b>	<b>2.847.578.800</b>	<b>65%</b>	<b>1.744.361.000</b>	<b>70%</b>	<b>3.312.947.700</b>	<b>75%</b>	<b>3.759.335.500</b>	<b>80%</b>	<b>4.135.269.050</b>	
	Penyusunan Perubahan RPJMD 2012-2017	Jumlah dokumen RPJMD Perubahan yang selaras dengan visi misi KDH & bersinergi dengan prioritas nasional					1 dokumen	541.627.700					SKPD dan stakeholder Prov/kab/Kota

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN
			2013		2014		2015		2016		2017		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Prosentase partisipasi masyarakat dan jumlah peserta dalam Musrenbang RKPD	forum SKPD 3 hari, musrenbang 3 hari, pasca musrenbang 2 hari	448.500.000			100%, 500 orang	782.946.000		887.085.000		975.793.500	SKPD dan stakeholder Prov/kab/Kota
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Pasca Musrenbang	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Pasca Musrenbang			5 kegiatan (forum SKPD, Musrenbang, pasca musrenbang, musrenbang kab/kota, musrenbangnas)	446.858.000							SKPD dan stakeholder Prov/kab/Kota

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN
			2013		2014		2015		2016		2017		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen (160 buku)	249.100.000	1 dokumen (80 buku)	209.150.000	1 dokumen (100 buku)	240.645.000		323.905.000		356.295.500	SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Waktu pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi; jumlah laporan monev yang tersedia	12 bulan, 4 laporan	200.000.000	12 bulan, 4 laporan (240 buku)	368.273.000	12 bulan, 4 laporan	517.158.000	12 bulan, 4 laporan	555.237.500	12 bulan, 4 laporan	610.761.250	SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang tersedia			3 dokumen (200 buku)	253.030.000	2 dokumen	574.142.000		575.000.000		632.500.000	SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS	Jumlah dokumen RKPD, KUA dan PPAS yang tersedia	8 dokumen; 795 buku	348.250.000									SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN
			2013		2014		2015		2016		2017		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA & PPAS yang tersedia			8 dokumen (560 buku)	228.080.000	2 dokumen	324.259.000		325.100.000		357.610.000	SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan SATAM EMAS	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi, jumlah dokumen monev Satam Emas	7 kabupaten/kota	448.200.000	7 kabupaten/kota, 2 dokumen	238.970.000	7 kabupaten/kota	332.170.000		293.430.000		322.773.000	SKPD Prov/Kab/Kota dan Masyarakat
	Seminar Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI)	Frekuensi seminar yang dilaksanakan, adanya kesepakatan memperkuat ilmu pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan	1 kali seminar, ada kesepakatan	309.348.800								0	PNS, Politis, Ormas, LSM, DPRD Prov/Kab/Kota, Bupati/walikota, Tomas, dll

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Provinsi	Frekuensi koordinasi dan jumlah dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program strategis provinsi yang tersedia	5 kali pertemuan, 1 dokumen perencanaan dan 1 dokumen monev	400.000.000										SKPD Prov/Kab/Kota dan Masyarakat
	Studi tingkat kepuasan pelayanan SKPD Prov. Kep. Babel	Jumlah kajian dan survey tingkat kepuasan kinerja SKPD yang tersedia	1 kajian	444.180.000										SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Penyusunan Perubahan RPJPD 2005-2025	Dokumen perubahan RPJPD 2005-2025							1 dokumen	799.578.000				SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Penyusunan RPJMD 2017-2022	Dokumen RPJMD 2017-2022							1 dokumen					SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN
			2013		2014		2015		2016		2017		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan/rekomendasi bahan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah									6 Laporan/Rekomendasi	425.190.000	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang ekonomi terhadap RPJMD</b>	<b>60%</b>	<b>683.500.000</b>	<b>65%</b>	<b>337.449.000</b>	<b>70%</b>	<b>564.366.700</b>	<b>75%</b>	<b>898.257.000</b>	<b>80%</b>	<b>988.082.700</b>	
	Rencana Umum Pembangunan Ekonomi	Jumlah buku Rencana Umum Pembangunan Ekonomi			1 buku RUPE	337.449.000							SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Koordinasi Perencanaan bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang ekonomi							1 dokumen	300.000.000		330.000.000	SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Penyusunan tabel input output daerah	Jumlah Dokumen Tabel Input-Output							1 dokumen	198.257.000		218.082.700	SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi yang tersedia					1 dokumen	277.721.700						SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Fasilitasi dan Koordinasi Event Sail Karimata 2016							286.645.000						
	Penyusunan <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	Jumlah dokumen tentang Informasi Indikator Pembangunan Ekonomi (ICOR)	1 dokumen (60 buku)	184.400.000								0		SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Kajian Finansial Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Kajian Finansial Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi							2 dokumen	400.000.000		440.000.000		SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Konsultasi regional Produk Domestik Regional Bruto dan Informasi Sosial Ekonomi Wilayah se-Sumatera Tahun 2013	Jumlah pelaksanaan konreg PDRB se-Wilayah Sumatera; jumlah kesepakatan persamaan persepsi pembangunan ekonomi dan diseminasi informasi	1 kali konreg; 1 kesepakatan	499.100.000								0		SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		sosial ekonomi												
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sosial budaya terhadap RPJMD	60%	993.540.000	65%	1.870.392.000	70%	1.734.791.000	75%	963.625.000	80%	1.059.987.500		
	Penyusunan Data Kemiskinan	Jumlah dokumen data kemiskinan yang tersedia	1 dokumen (40 buku)	200.000.000									SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pendidikan untuk semua (PUS) dan Jaringan Penelitian (Jarlit) dan	Jumlah laporan koordinasi dan rakor PUS, Jarlit dan Pengembangan Pendidikan yang tersedia	10 laporan dan 20 buku penelitian	200.000.000									SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder	

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pengembangan Pendidikan													
	Fasilitasi dan Koordinasi Jaringan Penelitian (Jarlit) bidang Pengembangan Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan	Jumlah laporan penelitian bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan			30 laporan	411.206.000	30 laporan	383.200.000						SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Fasilitasi dan Koordinasi Program PNPM Mandiri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah rakor, rapat teknis, dan laporan Program PNPM-Mandiri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			1 kali rakor, 4 rapat tim teknis, 20 laporan	150.035.000								SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Prov Kep. Bangka	Jumlah laporan strategi penanggulangan kemiskinan di Prov Kep Babel yang tersedia	1 laporan (40 buku)	150.000.000										SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Belitung													
	Fasilitasi dan Koordinasi Monev Pencapaian MDGs di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan Monev pencapaian MDGs di Prov Kep Babel	10 laporan	149.000.000										SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Jumlah rakor dan rapat teknis, laporan, pelaksanaan TKPKD			2 rakor, 4 rapat tim teknis, 1 laporan (25 eks)	203.764.000								SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah kabupaten/kota yang dinilai (laporan pelaksanaan kegiatan)	7 kabupaten / kota (laporan, 10 buku)	136.193.000	7 kabupaten / kota; (laporan, 10 buku)	264.330.000	7 kabupaten / kota (laporan)	211.645.000						SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis SPM	Jumlah laporan capaian perencanaan pelaksanaan SPM di Prov Kep Babel	1 laporan (20 buku)	158.347.000	1 laporan (20 buku)	396.854.000								SKPD Prov/Kab/Kota dan

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														stakeholder
	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia			4 dokumen (3 laporan /30 eks, 60 eks buku IPM)	444.203.000								SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan sumber daya manusia					7 dokumen	500.000.000	4 dokumen	489.905.000	4 dokumen	538.895.500		SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan kebudayaan					3 dokumen	350.000.000	4 dokumen	473.720.000	4 dokumen	521.092.000		SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan pelaksanaan program nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					1 dokumen (10 laporan)	289.946.000						SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sarpra dan LH terhadap RPJMD</b>	<b>60%</b>	<b>973.600.000</b>			<b>80%</b>	<b>1.012.828.000</b>	<b>75%</b>	<b>256.050.000</b>	80%	281.655.000		
	Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen review masterplan pengendalian dan sumber daya alam dan lingkungan hidup					1 dokumen	1.012.828.000						SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Koordinasi Penyusunan masterplan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup (Review NSDA)	Jumlah dokumen masterplan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	1 dokumen	485.300.000								0		SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN
			2013		2014		2015		2016		2017		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Studi kelayakan KEK Pariwisata	Jumlah dokumen FS KEK Pariwisata yang tersedia	1 dokumen	488.300.000								0	SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup									256.050.000		281.655.000	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan</b>	<b>Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang pemerintahan terhadap RPJMD</b>					70%	243.284.400				0	
	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Berbasis SPM (Planning and Budgeting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	Jumlah dokumen Perencanaan Berbasis SPM yang tersedia					9 dokumen	243.284.400					SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN
			2013		2014		2015		2016		2017		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang pemerintahan dan otonomi daerah terhadap RPJMD							75%	650.000.000	80%	715.000.000	
	Koordinasi Pelaporan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan								4 Laporan	150.000.000		165.000.000	SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Koordinasi Perencanaan Berbasis SPM di Tingkat Provinsi								9 dokumen SPM	250.000.000		275.000.000	SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani								10 SKPD	250.000.000		275.000.000	SKPD Provinsi

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN
			2013		2014		2015		2016		2017		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah</b>	Prosentase Penelitian, Kerjasama dan Publikasi yang digunakan sebagai Rekomendasi Pemerintah Daerah	67%		67%		67%		75%	<b>1.000.000.000</b>	83%	1.100.000.000	
	Pengembangan Jaringan Penelitian	Jumlah Kerjasama dan Publikasi yang digunakan sebagai Rekomendasi Pemerintah Daerah							5 Kajian Kebijakan	<b>250.000.000</b>		275.000.000	SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Kajian Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah Kajian Penelitian yang digunakan sebagai Rekomendasi Pemerintah Daerah							5 Laporan	<b>350.000.000</b>		385.000.000	SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Kajian Potensi Inovasi Daerah	Jumlah Kajian Penelitian yang digunakan sebagai Rekomendasi Pemerintah Daerah							2 Dokumen	<b>400.000.000</b>		440.000.000	SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	<b>URUSAN WAJIB STATISTIK</b>							1.443.549.000		2.545.120.000		2.799.632.000	

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses					70%	1.443.549.000	75%	2.545.120.000	80%	2.799.632.000		
	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) dan Raperda yang tersedia					3 aplikasi, 1 website (SEUPPD, SIMONE V, Web Bappeda, PPIS), 1 Raperda Sisrenbangda	1.090.060.000						SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah / Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) dan Raperda yang tersedia								2.000.000.000		2.200.000.000	SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder	

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN	
			2013		2014		2015		2016		2017			
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	terintegrasi													
	Fasilitasi Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah data pokok perencanaan pembangunan yang valid					4 data pokok	353.489.000						SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Instalasi dan Implementasi aplikasi Geoportal pada Simpul Jaringan Nasional	Presentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses									Aplikasi geoport	415.398.000		Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Penyusunan Basis Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen basis data pembangunan provinsi kepulauan bangka belitung									1 Dokumen	1.000.000.000		Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI /KELOMPOK SASARAN
			2013		2014		2015		2016		2017		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									345.120.000		379.632.000	SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	Updating dan pengembangan database Bangka Belitung <i>Pro Poor Information System</i>									200.000.000		220.000.000	SKPD Prov/Kab/Kota dan stakeholder
	<b>TOTAL BELANJA</b>			<b>16.807.658.400</b>		<b>18.270.333.487</b>		<b>22.189.478.147</b>		<b>23.049.418.792</b>		<b>24.699.400.049</b>	

## B A B VI

### INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU

#### PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

---

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan rencana kegiatan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah berkewajiban melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan dan hasil pembangunan. Secara umum indikator kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi tanggung jawab Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai koordinator perencanaan pembangunan.

Memperhatikan tugas dan fungsi melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka indikator kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 disajikan pada Tabel VI.1.

Sedangkan indikator kinerja dan target yang akan dicapai dan kebijakan umum dan program pembangunan dari dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012–2017 disajikan pada Tabel VI.2.

Tabel VI.1

Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Yang Mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kelancaran tupoksi		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan sarana penunjang disiplin aparatur		100%		100%	100%		
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	100%				
5	Perencanaan RTRW	Prosentase meningkatnya sinkronisasi perencanaan tata ruang			75%	80%	85%	90%	90%
6	Kerjasama Pembangunan			60%	65%	70%	75%	80%	80%

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sarpra dan LH terhadap RPJMD			65%				
8	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sarpra dan LH terhadap RPJMD		60%	65%	70%	75%	80%	80%
9	Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sarpra dan LH terhadap RPJMD		60%	65%	70%	75%	80%	80%
10	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan manajemen program dan aparatur untuk kelancaran dan efektifitas tugas pokok dan fungsi Bappeda		60%	65%	70%	75%	80%	80%
11	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran tahunan terhadap RPJMD		60%	65%	70%	75%	80%	80%
12	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang ekonomi terhadap RPJMD		60%	65%	70%	75%	80%	80%

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sosial budaya terhadap RPJMD		60%	65%	70%	75%	80%	80%
14	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sarpra dan LH terhadap RPJMD		60%		80%	75%	80%	80%
15	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang pemerintahan terhadap RPJMD				70%			70%
16	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang pemerintahan dan otonomi daerah terhadap RPJMD					75%	80%	80%
17	Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah	Prosentase Penelitian, Kerjasama dan Publikasi yang digunakan sebagai Rekomendasi Pemerintah Daerah		67%	67%	67%	75%	83%	83%
18	Pengembangan Data/Informasi	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses		60%	65%	70%	75%	80%	80%

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017

Tabel VI.2

## Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017

No.	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Misi 1 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan</b>							
1.	Pengembangan kelembagaan Koperasi dan UMKM dan kelembagaan ekonomi lainnya	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	4 dokumen perencanaan	4 dokumen perencanaan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
<b>Misi 2 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (society empowerment) dan kualitas sumber daya manusia (SDM)</b>							
1.	Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Persentase kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen PPRG	0%	20%	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Seluruh SKPD
2.	Peningkatan perencanaan dan koordinasi terhadap seluruh penanggulangan kemiskinan	Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan sosial budaya dengan dokumen RPJMD	60%	90%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
<b>Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang</b>							
1.	Mengelola sumber daya alam yang ramah lingkungan berkonsep pembangunan berkelanjutan untuk	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pembangunan	1 dok	2 dok	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

No.	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Peningkatan akses dan informasi SDA dan LH						
2.	Peningkatan koordinasi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai lokal untuk mencegah dampak negatif lingkungan akibat pemanfaatan ruang	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	0	Perda RTRW dan Perda RTR Kawasan Strategis	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
<b>Misi 4 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Mengembangkan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh</b>							
1.	Peningkatan Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur	Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Infrastruktur melalui pola Kerjasama Pemerintah-Swasta	0	4 Kerjasama	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2.	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang tersebar di kabupaten/kota	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya kebijakan perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang tersebar di kabupaten/ kota.	0	6 kebijakan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

No.	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Pengembangan Pangkalpinang sebagai daerah Metro	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya Kebijakan Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang tersebar di kabupaten/ kota.	0	1 kebijakan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
4.	Penetapan dan pengembangan Kawasan Industri untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap kabupaten / kota	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Beroperasinya kawasan industri di kabupaten/kota	1 kawasan industri	7 kawasan industri	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
5.	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Tjg. Berikat (Bangka Tengah) dan Tjg. Batu (Belitung)	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terwujudnya KEK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tahapan/proses penetapan kawasan	2 unit	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
6.	Percepatan pelaksanaan MP3EI di wilayah Sumatera untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya roadmap dukungan Prov. Kep. Bangka Belitung dalam pelaksanaan MP3EI Koridor Sumatera	0	1 unit tk provinsi; 7 unit tk kab/kota	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
7.	Pengembangan Tjj. Ular	Perencanaan dan	Berkembangnya Tjg. Ular	Merupakan KPI	Pusat Industri dan	Perencanaan	Bappeda

No.	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dan Tjg. Kalian (Muntok - Bangka Barat) sebagai Kawasan Perhatian Industri	pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	dan Tjg. Kalian (Muntok - Bangka Barat) sebagai kawasan industri baru		Investasi	Pembangunan	
8.	Rintisan Pengembangan Trans Bangka Belitung (Sumatera – Bangka Belitung – Kalimantan).	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Berkembangnya Trans Bangka Belitung (Sumatera – Bangka Belitung – Kalimantan).	Jalur Trans Babel masih belum lancar	Lancarnya arus barang dan penumpang melalui Trans Babel	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
9.	Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan kawasan pariwisata dengan keunggulan lokal.	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Meningkatnya infrastruktur di kawasan pusat pertumbuhan ekonomi	50%	75%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
<b>Misi 5 : Mewujudkan <i>good governance</i> dalam rangka mencapai <i>clean government</i></b>							
1.	Peningkatan kontrol lembaga non-pemerintah untuk mengawasi kinerja pemerintah	Pengembangan Lembaga ekonomi Perdesaan	Persentase desa swasembada	-	20%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2.	Pemanfaatan teknologi informasi guna memaksimalkan <i>e-government</i> dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah Sistem informasi manajemen Pemda	-	10 SIM	Statistik	Bappeda, Biro Pemerintahan

No.	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Jumlah Kerjasama Antar Daerah	4 kerjasama	4 kerjasama	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
3.	Percepatan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara menyeluruh	Perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	70%	90%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
		Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		70%	90%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
		Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersedianya data/informasi/statistik daerah yang <i>uptodate</i> dan mudah diakses pengguna dan masyarakat umum	1 website	1 website	Statistik	Bappeda, Diskominfo

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017

## **B A B VII**

### **PENUTUP**

---

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan dokumen yang memuat rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara khusus, dan secara umum kondisi, situasi dan potensi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Hasil pelaksanaan dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah tahun 2017-2022 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolok ukur ini akan terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja kegiatan dan program, baik pada tingkat *output* maupun *outcome*.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah pada hakikatnya disusun untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode 2017-2022 dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Oleh karena itu diharapkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah ini dapat dijalankan sesuai rencana dengan didukung oleh seluruh sumber daya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat diimplementasikan dengan konsisten sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



## **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

- + Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Terpadu
- + Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- + Jl. Pulau Belitung No. 2, Kelurahan Air Itam
- Telp. (0717) 439333 - 439336
- Fax. (0717) 439335
- + PANGKALPINANG